

## Pancasila Sebagai Ideologi Negara dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia

Raja Andika<sup>1</sup>, Ibnu Rayhan<sup>2</sup>, Nadib Mayendra<sup>3</sup>, M.Zikri Maulana<sup>4</sup>, Diyo Pratama<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email Koresponden: [dio655040@gmail.com](mailto:dio655040@gmail.com)

**Abstract.** Pancasila as a state ideology plays a fundamental role in the development of Indonesian democracy, but its implementation faces various challenges in the contemporary era. This research aims to deeply analyze the strategic role of Pancasila in building and strengthening the democratic system in Indonesia, focusing on the dynamics of its implementation, challenges, and strengthening strategies. Using a literature review method with a qualitative-descriptive approach, this research analyzes various literature sources from 2019-2024 through systematic literature review (SLR) and critical discourse analysis (CDA). The results show that Pancasila plays an effective role as an instrument that bridges Indonesia's diversity with universal democratic principles, as well as a filter in the adoption of global democratic values. Implementing Pancasila values in the context of democratization requires a comprehensive approach that includes strengthening leadership, revitalizing education, and adapting to digital transformation. This research contributes to the development of a strategy to strengthen Pancasila-based democracy that is adaptable to the times, but still rooted in the noble values of the Indonesian nation.

**Keywords:** Pancasila, State Ideology, Democratisation

**Abstrak.** Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran fundamental dalam pembangunan demokrasi Indonesia, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis Pancasila dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada dinamika implementasi, tantangan, dan strategi penguatannya. Menggunakan metode studi literatur review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur dari tahun 2019-2024 melalui systematic literature review (SLR) dan critical discourse analysis (CDA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berperan efektif sebagai instrumen yang menjembatani keberagaman Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, sekaligus menjadi filter dalam adopsi nilai-nilai demokrasi global. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokratisasi memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kepemimpinan, revitalisasi pendidikan, dan adaptasi terhadap transformasi digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi penguatan demokrasi berbasis Pancasila yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap mengakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

**Kata kunci:** Pancasila, Ideologi Negara, Demokratisasi

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang menjadi landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berperan sebagai falsafah negara, tetapi juga menjadi panduan dalam mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan demokrasi, Pancasila menjadi instrumen penting yang menjembatani keberagaman Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal (Monitasari et al., 2021). Eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara telah membuktikan kemampuannya dalam mengakomodasi pluralitas bangsa

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, sekaligus menjadi pemersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran vital Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Sakinah & Dewi (2021), implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia telah menciptakan karakteristik unik yang membedakannya dengan sistem demokrasi di negara lain. Keunikan ini tercermin dari bagaimana Indonesia mampu memadukan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Erlina (2019) menunjukkan bahwa Pancasila telah berhasil menjadi filter dalam adopsi nilai-nilai demokrasi global, sehingga praktik demokrasi di Indonesia tetap sejalan dengan kepribadian bangsa dan tidak kehilangan jati dirinya.

Dalam era globalisasi dan dinamika politik kontemporer, tantangan terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara semakin kompleks. Penelitian Banerjee et al. (2021) mengungkapkan bahwa penetrasi ideologi transnasional dan pengaruh sistem politik global telah menciptakan berbagai tantangan baru dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokratis. Di sisi lain, Pancasila justru membuktikan relevansinya sebagai solusi dalam menghadapi berbagai krisis demokrasi modern. Hal ini diperkuat oleh temuan Rizal et al. (2022) yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu menjadi penangkal efektif terhadap berbagai ancaman demokrasi seperti radikalisme, ekstremisme, dan politisasi identitas yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Pembangunan demokrasi berbasis Pancasila memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Wulandari (2023) menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan pendidikan Pancasila, internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sosial-politik, hingga implementasi kebijakan publik yang mencerminkan spirit Pancasila. Senada dengan hal tersebut, Haeba et al. (2024) menggarisbawahi urgensi transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam praksis demokrasi kontemporer melalui berbagai inovasi dan adaptasi yang tetap mempertahankan esensi fundamental Pancasila sebagai ideologi negara.

Kajian tentang peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam pembangunan demokrasi Indonesia menjadi sangat krusial di tengah berbagai tantangan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara berperan dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analitis-kritis, penelitian ini akan mengeksplorasi dinamika

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokratisasi, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan demokrasi berbasis Pancasila. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep dan praktik demokrasi Pancasila yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap mengakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan berbagai sumber literatur terkait peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel-artikel ilmiah, jurnal akademik, buku referensi, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Sumber-sumber literatur tersebut diakses melalui beberapa database akademik terpercaya seperti Google Scholar dan Pubmed, dengan menggunakan kata kunci pencarian yang relevan seperti "Pancasila", "state ideology", "demokrasi Indonesia", "nilai-nilai Pancasila", "demokratisasi", dan "pembangunan demokrasi".

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan systematic literature review (SLR) yang terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, meliputi relevansi topik, tahun publikasi, kredibilitas sumber, dan kebaruan data. Tahap kedua adalah ekstraksi data dengan menggunakan matriks sintesis yang memuat informasi tentang teori, konsep, temuan empiris, dan argumentasi kritis dari setiap sumber literatur yang dianalisis. Tahap ketiga adalah sintesis data yang dilakukan secara interpretatif-kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika peran Pancasila dalam pembangunan demokrasi Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek historis, filosofis, sosiologis, dan politik.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber sumber data dengan membandingkan berbagai perspektif dan temuan dari sumber literatur yang berbeda. Proses analisis data juga melibatkan teknik critical discourse analysis (CDA) untuk mengungkap konteks, makna, dan implikasi dari berbagai wacana tentang Pancasila dan demokrasi dalam literatur yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami interpretasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan demokrasi kontemporer. Kerangka analisis tersebut memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sintesis yang mendalam dan pemahaman yang holistik tentang peran

strategis Pancasila sebagai ideologi negara dalam membentuk dan menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dinamika Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Demokrasi Kontemporer**

Implementasi Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan yang signifikan di era globalisasi, dimana nilai-nilai global seringkali berbenturan dengan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Menurut Silitonga (2020), globalisasi telah mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku sebagian warga negara Indonesia yang membutuhkan konsistensi dan ketegasan pemerintah dalam merawat nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Suntana et al. (2023) yang mengungkapkan adanya ketidakpercayaan ideologis di kalangan mahasiswa Indonesia, yang tidak berkorelasi dengan rekam jejak politik dan kapasitas aktor negara, melainkan dengan evaluasi norma-norma religius yang mereka anut.

Tantangan implementasi Pancasila juga tercermin dalam dinamika politik kontemporer Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi elektoral. Kristiyanto et al. (2023) mengemukakan bahwa era reformasi telah menghadirkan gambaran berbeda dari era sebelumnya, dimana partai-partai politik mengalami guncangan akibat perubahan rezim demokratis dari demokrasi yang terkontrol dan represif menuju demokrasi liberal yang mengutamakan fungsi elektoral. Hal ini menuntut adanya penguatan institusionalisasi partai politik sebagai bagian dari konsolidasi demokratis untuk peningkatan kualitas demokrasi.

Dalam konteks pendidikan, upaya peningkatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan demokrasi. Yuherman (2023) menekankan pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan dan memperkuat semangat demokrasi dan nasionalisme pada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah menerima materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengalami peningkatan yang baik dalam sikap demokratis dan rasa nasionalisme.

Demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pendidikan Islam, juga menjadi manifestasi dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Mardani et al. (2023) menggarisbawahi bahwa demokratisasi pendidikan Islam yang memiliki indikator terbuka, rasional, jujur, dan mematuhi aturan yang disepakati bersama, dituntut untuk merefleksikan dan mengevaluasi konstruksi pendidikan secara komprehensif sambil tetap menjunjung tinggi identitas Islam. Perkembangan teknologi dan informasi juga memberikan dampak signifikan

terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokrasi digital. Dewi & Widyawati (2021) mengungkapkan bahwa ketersediaan internet sebagai media informasi dan komunikasi telah mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai platform online, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap Indeks Demokrasi Indonesia di kawasan barat Indonesia.

### **B. Peran Kepemimpinan dalam Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila**

Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam memperkuat implementasi ideologi Pancasila dan membangun kepercayaan publik. Rosing et al. (2022) mengemukakan bahwa dalam konteks darurat, kemampuan pemimpin untuk mengembangkan kepercayaan orang lain sangat penting bagi efektivitas kepemimpinan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kepemimpinan demokratis dan otokratis dapat menciptakan kepercayaan terhadap pemimpin tergantung pada fase kinerja tim.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan publik juga tercermin dalam praktik hubungan masyarakat pemerintah. Kriyantono et al. (2022) mengungkapkan bahwa era demokratis telah mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akses terbuka terhadap informasi publik, menjadikan hubungan masyarakat sebagai bagian integral dari proses demokratis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktisi perempuan memiliki kompetensi yang lebih tinggi dalam menerapkan model komunikasi dua arah pada tingkat manajerial.

Dalam konteks pelayanan publik, implementasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sikap dan perilaku penyedia layanan. Silva et al. (2023) menekankan bahwa tindakan penyedia layanan kesehatan dapat mempengaruhi secara signifikan pengalaman klien, kepatuhan terhadap rekomendasi, dan kemungkinan untuk kembali menggunakan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan pentingnya menyelaraskan sikap penyedia layanan dengan nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dalam konteks ideologi negara juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola keberagaman dan menjaga keharmonisan sosial. Santoso et al. (2023) menyoroti pentingnya peran tokoh-tokoh pahlawan daerah dan nasional dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia di abad 21, khususnya dalam menjaga keberlangsungan dan konsolidasi demokrasi.

Efektivitas kepemimpinan dalam implementasi ideologi negara juga tercermin dari kemampuan untuk mengelola krisis dan mengambil keputusan strategis. Krieger et al. (2022) menunjukkan bahwa ideologi politik pemimpin dapat mempengaruhi hasil kebijakan publik, seperti yang terlihat dalam penanganan pandemi COVID-19, dimana orientasi ideologis berkorelasi dengan tingkat mortalitas dan tekanan pada kapasitas rumah sakit.

### **C. Tantangan dan Strategi Penguatan Ideologi Pancasila di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi penguatan ideologi Pancasila. Dessimoz & Thomas (2024) mengemukakan bahwa demokratisasi pengetahuan melalui teknologi AI telah mengubah cara pengetahuan diterapkan, tidak lagi terbatas pada spesialis dalam suatu bidang, tetapi melibatkan tim multidisiplin dan program penelitian yang beragam. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila.

Transformasi digital juga mempengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi. Berdasarkan penelitian tentang demokratisasi konferensi ilmiah melalui Twitter selama pandemi COVID-19, terbukti bahwa platform media sosial dapat memfasilitasi dan mendemokratisasi aliran informasi serta jejaring profesional (Rosing et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan pentingnya adaptasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks komunikasi digital.

Kokaisl & Hejzlarová (2023) mengingatkan tentang peran negara dalam membentuk identitas etnis dan ideologi, dimana implementasi intervensi negara menunjukkan bahwa elemen-elemen utama identitas etnis sangat mudah berubah dan maknanya bervariasi secara signifikan. Hal ini relevan dengan upaya mempertahankan dan memperkuat ideologi Pancasila di tengah arus globalisasi digital.

Tantangan implementasi sistem farmakovigilans di negara dengan sumber daya terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh Nzolo et al. (2019), memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan kesehatan masyarakat dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang ada. Hal ini dapat dianalogikan dengan upaya penguatan ideologi Pancasila yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Penguatan ideologi Pancasila di era digital juga membutuhkan strategi yang komprehensif dalam pendidikan. Suntana et al. (2023) menekankan pentingnya normalisasi hubungan negara-agama dan evaluasi sistem hukum nasional yang mempertimbangkan norma-norma religius. Hal ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mempertahankan relevansi ideologi Pancasila di tengah transformasi digital.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia kontemporer. Implementasi nilai-nilai Pancasila

menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan digitalisasi, mulai dari penetrasi ideologi transnasional hingga transformasi pola komunikasi dan partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, Pancasila tetap membuktikan relevansinya sebagai instrumen fundamental dalam menjembatani keberagaman Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, sekaligus menjadi filter efektif dalam mengadopsi nilai-nilai demokrasi global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Penguatan implementasi Pancasila dalam konteks demokratisasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, mencakup aspek kepemimpinan, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi digital. Peran kepemimpinan yang efektif dalam mengelola keberagaman dan krisis, revitalisasi pendidikan Pancasila, serta optimalisasi platform digital dalam mendukung partisipasi demokratis menjadi faktor kunci dalam memperkuat fondasi demokrasi berbasis Pancasila. Transformasi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru yang membutuhkan strategi inovatif dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk melalui kolaborasi multipihak dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan ideologi Pancasila dalam kehidupan demokratis Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, R., Kelkar, A. H., Logan, A. C., Majhail, N. S., & Pemmaraju, N. (2021). The Democratization of Scientific Conferences: Twitter in the Era of COVID-19 and Beyond. *Current Hematologic Malignancy Reports*, 132–139. <https://doi.org/10.1007/s11899-021-00620-w>
- Dessimoz, C., & Thomas, P. D. (2024). AI and the democratization of knowledge. *Scientific Data*, 11(1), 1–5. <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03099-1>
- Dewi, D. M., & Widyawati, D. (2021). Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia [The Role of the Internet in Improving Democratic Development in Western Indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 43–66. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2029>
- Erlina, T. (2019). Membangun Karakter Ke-Indonesiaan Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Global. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 153–162. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.21612>
- Haeba, I. D., Thoha, A. M., & Ahim, R. (2024). Wacana Dinamis Nahdlatul Ulama : Analisis Kritis terhadap Perubahan Sosial. *TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 125–158. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v14i74.444>
- Kokaisl, P., & Hejzlarová, T. (2023). The role of ideology in creating new nations in the USSR and strengthening a centralised state—The example of the Dungans in central Asia. *Heliyon*, 9(6), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16875>
- Krieger, N., Testa, C., Chen, J. T., Hanage, W. P., & McGregor, A. J. (2022). Relationship of political ideology of US federal and state elected officials and key COVID pandemic outcomes following vaccine rollout to adults: April 2021–March 2022. *The Lancet Regional Health - Americas*, 16(April 2021), 100384. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100384>

- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12), e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Kriyantono, R., Ida, R., Tawakkal, G. T. I., & Safitri, R. (2022). Not just about representative: When democracy needs females and their competency to run Indonesian government public relations to management level. *Heliyon*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08714>
- Mardani, D., Susiawati, I., & Sab'rina Fathimah, N. (2023). Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam KURIKULUM MERDEKA DALAM DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Islamic Journal*, 6, 25–36. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/view/3310>
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 232–245. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.17>
- Nzolo, D., Kuemmerle, A., Lula, Y., Ntamabyaliro, N., Engo, A., Mvete, B., Liwono, J., Lusakibanza, M., Mesia, G., Burri, C., Mampunza, S., Nzolo, G. T., Kuemmerle, A., Lula, Y., Ntamabyaliro, N., Engo, A., Mvete, B., Liwono, J., Lusakibanza, M., ... Tona, G. (2019). Development of a pharmacovigilance system in a resource-limited country: the experience of the Democratic Republic of Congo. *Therapeutic Advances in Vaccines*, 9(6), 259–261. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2042098619864853>
- Rizal, M., Budiman, F., Salsabilla, A. R., Gunawan, M. A., & Nugraha, R. G. (2022). Penerapan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Seharian-Hari Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1975–1981. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2891>
- Rosing, F., Boer, D., & Buengeler, C. (2022). When timing is key: How autocratic and democratic leadership relate to follower trust in emergency contexts. *Frontiers in Psychology*, 13(August), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.904605>
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1432>
- Santoso, G., Abdul Karim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No(01), 224–240. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/142/174>
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>
- Silva, M., Spielman, K., Dougherty, L., Kassegne, S., & Kalamar, A. (2023). Results From a Multimethod Exploratory Scale Development Process to Measure Authoritarian Provider Attitudes in Democratic Republic of Congo and Togo. *Global Health Science and Practice*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-22-00421>
- Suntana, I., Rusliana, I., Asdak, C., & Gazalba, L. (2023). Ideological distrust: re-understanding the debate on state ideology, normalization of state-religion relationship, and legal system in Indonesia. *Heliyon*, 9(3), e14676. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14676>
- Wulandari, L. (2023). Revitalisasi Pancasila : Epos dan Kontroversi di Balik Undang- Undang Cipta Kerja. *Unes Law Review*, 6(1), 3794–3801. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1183>



Yuherman, A. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3). <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25109>